

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamisa, 6 September 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 6 September 2018	PII Kantongi Mandat Baru	PT PII bakal mendapat mandate baru untuk menjamin pinjaman yang diajukan badan usaha milik negara guna mendukung pendanaan proyek-proyek infrastruktur
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)	Kamis, 6 September 2018	Mencari Cuan dari Green Building	Belakangan ini label green building begitu banyak dipajang ketika pengembang merilis bangunan baru sejenis mal, perkantoran, ataupun apartemen
3	Kompas (Halaman, 14)	Kamis, 6 September 2018	Berita Foto	Pembangunan Irigasi
4	Kompas (Halaman, 16)	Kamis, 6 September 2018	Fokus Selesaikan Jalan Tol Trans-Jawa	PT. Jasa Marga Tbk memastikan proyek jalan tol trans Jawa yang dimilikinya akan selesai secara bertahap akhir tahun ini.
5	Kompas (Halaman, 18)	Kamis, 6 September 2018	Warga Mulai Bangun Hunian Sementara	Sebagian besar warga korban gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat, mulai kembali ke bekas rumahnya guna membangun hunian sementara secara mandiri.
6	Kompas (Halaman, 18)	Kamis, 6 September 2018	Berita Foto	Pembangunan Jembatan Sosrodilogo
7	Media Indonesia (Halaman, 2)	Kamis, 6 September 2018	Tol Trans- Jawa Menghidupkan Ekonomi Warga	Roda perekonomian di pantura Jawa Tengah berjalan lebih cepat dengan selesainya pembangunan Tol Trans Jawa.
8	Koran Tempo (Halaman, 21)	Kamis, 6 September 2018	Pemerintah Jawa Barat Ubah Rencana Tata Ruang	Asisten ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution, mengatalan tengah menuntaskan revisi rencana tata ruang wilayah Jawa Barat untuk mengadopsi proyek jalan tol dalam kota Bandung.

Judul	PII Kantongi Mandat Baru	Tanggal	Kamis, 6 September 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PT PII bakal mendapat mandate baru untuk menjamin pinjaman yang diajukan badan usaha milik negara guna mendukung pendanaan proyek-proyek infrastruktur		

PII Kantongi Mandat Baru

JAKARTA — PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia bakal mendapat mandat baru untuk menjamin pinjaman yang diajukan badan usaha milik negara guna mendukung pendanaan proyek-proyek infrastruktur.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Sebelumnya, pemerintah memberi penjaminan secara langsung atas pinjaman-pinjaman badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan bahwa pemberian mandat tersebut membuka peluang yang lebih besar kepada perseroan untuk semakin aktif memberi penjaminan pada proyek-proyek infrastruktur. Mandat baru ini diperkirakan bisa berjalan efektif pada bulan ini.

Dengan mandat baru ini, kata Armand, penjaminan pinjaman BUMN bisa dilakukan secara bilateral. Kendati demikian, saat ini belum ada rencana pinjaman BUMN yang akan dijamin oleh PII.

"Kalau BUMN butuh pendanaan ya, ini bisa langsung [penjaminan] bilateral. Ini akan lebih cepat karena dulu kan penjaminan oleh pemerintah, sekarang [penjaminan] oleh PII," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

► Mandat baru yang diperoleh PII diperkirakan berjalan efektif pada bulan ini.

► PII membidik eksposur penjaminan hingga Rp42 triliun pada akhir 2018.

Armand memberi contoh lewat mandat baru, PII bisa memberi jaminan atas surat utang atau pinjaman yang diterbitkan PT Hutama Karya (Persero).

Sebelumnya, pada 2016 dan 2017, Kementerian Keuangan juga memberi jaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh Hutama Karya.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Kementerian Keuangan sudah membuka ruang penugasan kepada PII untuk menjamin pinjaman yang dilakukan oleh BUMN.

Hal ini diatur dalam PMK No.180/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung

dari Lembaga Keuangan Internasional ke BUMN.

Dalam beleid itu, Kemenkeu bisa memberi penugasan khusus kepada PII untuk memberi jaminan, baik jaminan penuh maupun jaminan sebagian.

SEMAKIN LUAS

Menurut Armand, mandat baru membuka peluang bagi PII untuk memberi penjaminan lebih luas.

Dia beralasan bahwa penjaminan pinjaman BUMN tidak harus mengikuti Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Ketentuan ini membatasi hanya 19 sektor yang bisa dikerjasamakan.

Sejak dibentuk pada 2009, PII memiliki mandat yang lebih luas dan

tidak lagi terbatas pada penjaminan. BUMN itu kini diberi mandat untuk mendampingi transaksi agar proyek kerja sama diminati investor.

Secara umum, PII membidik eksposur penjaminan hingga Rp42 triliun pada akhir 2018 dengan nilai investasi proyek-proyek yang dijamin mencapai Rp210 triliun.

Armand menuturkan bahwa PII menargetkan penandatanganan penjaminan untuk lima hingga enam proyek infrastruktur dalam 4 bulan mendatang. Proyek-proyek itu ialah preservasi jalan lintas timur Sumatra di Provinsi Sumatra Selatan, preservasi jalintim di Provinsi Riau, SPAM Semarang Barat, dan kereta api Makassar—Parepare. PII juga mengincar penjaminan proyek jalan tol Semarang—Demak dan satelit multifungsi. ■

MANDAT BARU PERBANYAK PROYEK YANG DIBANGUN

Keberadaan PII dalam memberi penjaminan proyek diharapkan dapat menarik lebih banyak lagi investor untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Hingga 2017, ada 16 proyek yang sudah diberi penjaminan oleh BUMN tersebut. Adanya mandat baru yang dipercayakan kepada PII tentunya akan menambah jumlah proyek yang akan dibangun investor.

Portofolio Proyek yang Diberi Penjaminan oleh PII

Proyek	Kapasitas	Nilai Investasi*
Jalan tol Serang—Panimbang	83,90 km	5,33
Jalan tol Jakarta—Cikampek Elevated	36,40 km	16,20
Jalan tol Cisumdawu	60,27 km	8,40
Jalan tol Jakarta—Cikampek Selatan	62,9 km	15
Jalan tol Batang—Semarang	77 km	11
Jalan tol Balikpapan—Samarinda	99 km	10
Jalan tol Pandaan—Malang	38 km	6
Jalan tol Manado—Bitung	39 km	5,10
Jalan tol Krian—Legundi—Bunder—Manyar	38,2 km	12,20
Jalan tol Probolinggo—Banyuwangi	172 km	20,10
SPAM Lampung	750 liter/detik	1,10
SPAM Umbulan	4.000 liter/detik	2,10
Palapa Ring Tengah	2.647 km	1
Palapa Ring Timur	8.454 km	5,10
Palapa Ring Barat	1.980 km	1,29
PLTU Batang	2x1.000 MW	57,10



Sumber: PII

Keterangan: *Rp triliun

BUMN BUMN PADANG

Judul	Mencari Cuan dari Green Building	Tanggal	Kamis, 6 September 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)		
Resume	Belakangan ini label green building begitu banyak dipajang ketika pengembang merilis bangunan baru sejenis mal, perkantoran, ataupun apartemen		

► GEDUNG RAMAH LINGKUNGAN

Mencari Cuan dari Green Building

Belakangan ini, label *green building* begitu banyak dipajang ketika pengembang merilis bangunan baru sejenis mal, perkantoran, ataupun apartemen.

Gloria F.K. Lawi
gloria.francisca@bisnis.com

Sayangnya, konsep bangunan ramah lingkungan yang memakan investasi besar belum banyak dipraktikkan di luar Jakarta karena kesulitan mencari peluang monetisasi. Padahal, pada 2020 konsep tersebut akan digantikan dengan konsep yang lebih berkembang lagi, yaitu *healthy building*.

CEO Green Building Council Indonesia (GBCI) Surendro mengatakan sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat tingkat dunia, World Building Council, pihaknya telah sepakat mengurangi emisi di setiap negara sampai 29%.

Adapun, langkah yang ditempuh adalah memulai pembangunan dengan standar *green building*, yang meliputi enam komponen utama: ketepatan tapak bangunan yang akan membahas soal ketersediaan ruang terbuka hijau 30%, *indoor quality* terkait dengan kualitas udara dari ketersediaan ventilasi, efisiensi energi, efisiensi air, manajemen building, dan terakhir siklus material. Komponen lain yang tak kalah penting adalah mendokumentasikan segala bahan bangunan.

Salah satu inovasi yang sudah berjalan adalah dengan penerapan peraturan daerah untuk standardisasi bangunan yang ramah lingkungan.

Misalnya saja pada 2015, Kementerian PUPR mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 yang mewajibkan setiap pembangunan baru gedung-gedung pemerintahan menerapkan prinsip bangunan hijau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijau.

► **Perubahan cara berpikir pengembang adalah hal pokok untuk menggerakkan pembangunan *green building*.**

► **Regulasi pemerintah tanpa pengawasan dan evaluasi atas implementasi bangunan hijau, juga akan sia-sia.**

"Nah, sekarang seharusnya bisa bergeser ke daerah-daerah lain seperti Makassar, Yogyakarta, dan lainnya. Sayangnya dari sisi *government* itu belum bisa meregulasi untuk secara *financing* bisa menggerakkan *green building* ini," jelas Surendro kepada *Bisnis*, Rabu (5/9).

Dia menilai tantangan terbesar dari bangunan hijau adalah investasi awal yang besar. Padahal, investasi itu akan diikuti dengan efisiensi biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Alasannya, konsep *green building* menawarkan konsep hemat energi yang secara otomatis menawarkan efisiensi pengeluaran dalam proses perawatan gedung.

"Kami selalu menghitung, konsep *green building* ini bisa *save* berapa besar. Targetnya di bawah 5 tahun ini sisi *financial cost* sudah terjamin, dan tentunya dari sisi penghuni juga harus mendapatkan *benefit*."

Apalagi, katanya, pada 2020 pihaknya bukan lagi mengusung konsep *green building* tetapi *healthy building*. "Selain hemat energi, bangunan harus dipastikan memberikan dampak kesehatan bagi penghuninya."

Beberapa upaya menuju konsep *healthy building* pada 2020 adalah dengan memastikan ketersediaan dan kualitas udara bagi penghuni, ketersediaan air bersih bagi penghuni dan aksesibilitas transportasi, kualitas jalur transportasi

serta jalan dengan desain yang sehat bagi penghuni.

Saat ini, katanya, sudah ada lebih dari 310 bangunan di Jakarta seperti perkantoran, pusat belanja, sekolah, dan apartemen yang bangunannya sudah sesuai dengan Pergub DKI, sementara di Bandung masih sekitar 270 bangunan.

Menurutnya, perubahan cara berpikir pengembang adalah hal pokok untuk menuntaskan pembangunan *green building*. Dia menilai regulasi pemerintah tanpa pengawasan dan evaluasi atas implementasi gedung hijau itu juga akan sia-sia.

ARSITEKTUR HIJAU

Direktur DP Architects PTE LTD, Rida Sobari menilai perusahaannya adalah salah satu perusahaan jasa arsitek yang sejak 2005 fokus dengan konsep bangunan *green building*. Dia menilai, cara berpikir pengembang adalah salah satu tantangan bagi arsitek dalam merumuskan gambar yang sesuai dengan konsep bangunan hijau.

Kurangnya pemahaman pengembang ataupun penghuni bangunan kerap kali membuat gambar hunian *green building* masih sering dipertanyakan dan kurang laku.

"Jelas masih ada *lack of awareness*, yaitu kurangnya pengetahuan *green building*. Buat arsitek, *green building* itu *mindset*, *attitude*, bagaimana mendesain. Itulah tugas yang masih sulit untuk kami lakukan saat ini," terang Rida.

Dia menambahkan, gambar yang diberikan arsitek dengan konsep itu juga tidak menguras banyak investasi, malah memberikan optimalisasi keuntungan karena tidak banyak membuang biaya tambahan.

Rida menilai para arsitek juga harus peduli dan taat pada aturan yang berlaku saat ini, apalagi dengan menyebarnya aturan *green building* ke daerah-daerah, sehingga, pembangunan gedung nantinya bisa sesuai standar ramah lingkungan dan ke depannya arsitek juga bisa membangun hunian ataupun gedung kantor yang sehat bagi penghuni. □

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 6 September 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Pembangunan Irigasi		

Pembangunan Irigasi



KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Proyek pembangunan irigasi masih berlangsung di Desa Werdoyo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (5/9/2018). Sampai tahun 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta hektar jaringan baru dan memperbaiki 3 juta hektar jaringan yang sudah ada. Hingga akhir 2017, pembangunan jaringan irigasi baru telah mencapai 632.098 hektar.

Judul	Fokus Selesaikan Jalan Tol Trans-Jawa	Tanggal	Kamis, 6 September 2018
Media	Kompas (Halaman, 16)		
Resume	PT. Jasa Marga Tbk memastikan proyek jalan tol trans Jawa yang dimilikinya akan selesai secara bertahap akhir tahun ini.		

Fokus Selesaikan Jalan Tol Trans-Jawa

JAKARTA, KOMPAS — PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan proyek Jalan Tol Trans-Jawa yang dimilikinya akan selesai secara bertahap akhir tahun ini. Perseroan menyiapkan kombinasi sumber pendanaan untuk mendukung pembangunannya.

"Sejak awal 2018, kami sudah menambah 107 kilometer jalan tol yang beroperasi. Empat bulan ke depan, kami akan selesaikan beberapa ruas lagi," kata Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani seusai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Ruas 107 km jalan tol itu tersebar, antara lain ruas Ngawi-Wilangan, Bogor Ring Road Seksi 2B, Gempol Pasuruan Seksi Rembang-Pasuruan, Solo-Ngawi Seksi Kartasura-Sragen, dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi I. Dengan demikian, total jalan tol yang kini dioperasikan Jasa Marga sepanjang 787,5 km. Sementara ruas yang ditargetkan beroperasi hingga akhir tahun ini, antara lain, adalah ruas Batang Semarang, Salatiga-Kartasura, Sragen-Ngawi, Wilangan-Kertosono, dan Pasuruan-Grati.

Desi menambahkan, pembangunan ruas-ruas jalan tol itu memerlukan dana investasi yang besar. Oleh karena itu, pihaknya mencari sumber pendanaan yang baru sekaligus menjaga struktur

keuangan perusahaan tetap sehat. Belanja modal Jasa Marga tahun ini direncanakan Rp 42,6 triliun.

Selain meminjam dari bank, Jasa Marga juga melakukan sekuritisasi aset lama, menerbitkan surat utang di level anak perusahaan serta menerbitkan surat utang global dalam bentuk rupiah dan reksa dana penyertaan terbatas untuk menambah modal. Ada pula kebijakan mengurangi kepemilikan mayoritas dan melepas kepemilikan minoritas.

Direktur Pengembangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adrian Priohutomo menambahkan, ada rencana pembangunan jalan tol baru perpanjangan dari ruas jalan tol yang ada, yakni Kertosono-Kediri, yang merupakan perpanjangan ruas Ngawi-Kertosono. Ruas lainnya adalah Padalarang-Ciranjang. Kini Jasa Marga telah mengajukan desain ruas sepanjang 27 km itu kepada Badan Pengatur Jalan Tol.

Sementara itu, melalui RUPSLB itu, posisi Refly Harun selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen digantikan Sapto Amal Damandari. Kemudian posisi Boediarso Teguh Widodo selaku Komisaris digantikan Anita Firmanti. Selain itu, posisi Direktur SDM dan Umum yang ditinggalkan Kushartanto akan diisi oleh Alex Denni. (NAD)

Judul	Warga Mulai Bangun Hunian Sementara	Tanggal	Kamis, 6 September 2018
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Sebagian besar warga korban gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat, mulai kembali ke bekas rumahnya guna membangun hunian sementara secara mandiri.		

Warga Mulai Bangun Hunian Sementara

MATARAM, KOMPAS — Sebagian besar warga korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mulai kembali ke bekas rumahnya guna membangun hunian sementara secara mandiri. Mereka secara gotong royong membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan yang rusak akibat dihantam gempa beruntun.

Pantauan *Kompas* di Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Timur, Rabu (5/8/2018), warga bergotong royong memasang rangka rumah hunian sementara di lokasi bekas rumah yang sudah dibersihkan. Bahkan, ada yang sudah menyiapkan tripleks, balok kecil, semen, dan seng.

"Sejak kemarin, saya dan keluarga sudah ke sini untuk membangun rumah sementara, sambil menunggu bantuan renovasi dari pemerintah. Sebagian bahan diambil dari rumah yang rusak. Sisanya, seperti dinding dari tri-

pleks, beli pakai uang sendiri. Kami tidak ingin lama-lama tinggal di pengungsian. Membosankan. Kalau sudah ada rumah, kan, bisa fokus kerja lagi," kata Subandi (50), warga Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang sebelumnya bekerja sebagai tukang ojek.

Hal serupa dilakukan warga Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga. Meski masih tinggal di pengungsian, mereka mulai pindah dari terpal ke hunian sementara. "Kami dapat bantuan tripleks dan seng, sedangkan untuk kerangka dari bambu kami akan beli dengan uang sendiri. Selain lebih nyaman dan lebih layak, ini juga untuk menghindari serangan penyakit. Selama tinggal di tenda, anak-anak saya sakit terus," kata Angkasa (40), warga lainnya.

Untuk membantu warga kor-

ban gempa yang akan membangun rumah, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh juga telah mengeluarkan imbauan kepada para pedagang bahan bangunan dan barang strategis lainnya di wilayah itu agar menambah stok. Namun, mereka dilarang menaikkan harga bahan bangunan.

"Jangan memanfaatkan kondisi ini untuk meraih keuntungan yang besar. Demi kemanusiaan, harga bahan bangunan hendaknya tidak dinaikkan," tuturnya.

Imbauan itu dikeluarkan pada 27 Agustus dalam rapat koordinasi yang dihadiri antara lain Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Dinas Perdagangan NTB, dan para distributor bahan bangunan.

Sementara itu, pembangunan fasilitas umum, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun sejumlah organisasi yang terjun ke Lombok, juga terus dikebut.

Project Manager PT Adhi Karya (Persero) Tbk Eko Prabowo mengatakan, pihaknya sedang membangun dua puskesmas dan lima sekolah di Kecamatan Pemang. Puskesmas itu ditargetkan dapat digunakan pada akhir September. Adapun lima sekolah ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober.

Adapun Aksi Cepat Tanggap bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sedang mengerjakan kompleks hunian sementara terpadu (*integrated community shelter/ICS*) di Desa Gondang, Kecamatan Gangga. Menurut Koordinator ICS ACT, Dede Abdul Rohman, ada 234 *shelter* yang dibangun ditambah masjid, sekolah, dapur, dan fasilitas kebersihan. "Saat ini, sebagian *shelter* sudah rampung dan ditargetkan mulai ditempati warga pada pertengahan September ini," tutur Dede. (ZAK/RUL)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 6 September 2018
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Pembangunan Jembatan Sosrodilogo		

Jembatan Sosrodilogo



KOMPAS/ADI SUCIPTO

Jembatan Sosrodilogo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi *tetenger* atau *landmark* baru. Jembatan penghubung Bojonegoro kota dengan wilayah Kecamatan Trucuk yang akan diresmikan pada Desember 2018 itu setiap sore hingga petang menjadi tempat baru untuk berswafoto. Pemandangan Bengawan Solo menjelang matahari terbenam menjadi daya tarik tersendiri. Hingga Rabu (5/9/2018), jembatan dalam tahap penyelesaian akhir, sementara pembangunan konstruksi dan badan jembatan sudah tuntas.

Judul	Tol Trans- Jawa Menghidupkan Ekonomi Warga	Tanggal	Kamis, 6 September 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 2)		
Resume	Roda perekonomian di pantura Jawa Tengah berjalan lebih cepat dengan selesainya pembangunan Tol Trans Jawa.		

Tol Trans-Jawa Menghidupkan Ekonomi Warga

RODA perekonomian di pantura Jawa Tengah berjalan lebih cepat dengan selesainya pembangunan Tol Trans-Jawa. Transportasi barang dan orang yang sebelumnya ditempuh berjam-jam, kini hanya memerlukan waktu cukup pendek kurang dari 50%, menjadi sebuah kemudahan bagi warga dan dunia usaha.

Mulai dioperasikannya Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57,5 km yang menghubungkan daerah Pejagan, Brebes dengan Pemalang, Jawa Tengah, telah memperpendek waktu perjalanan dari sebelumnya 2 jam, kini hanya 1 jam.

Tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Juni 2016 itu juga signifikan mengurangi dampak kemacetan lalu lintas di beberapa daerah di pantura.

"Cukup mempercepat proses pengiriman barang jika sebelumnya untuk ke Jakarta memerlukan waktu 5-6 jam, sekarang hanya 3-4 jam," kata Umang, pemilik industri batik di Pekalongan.

Sementara itu, ruas Tol Pemalang-Batang sepanjang 39,2 km sudah selesai dikerjakan, tetapi belum diresmikan. Masyarakat berharap ruas tol itu lebih mempercepat lagi distribusi barang dan jasa. Sebabnya, jarak



MU/AKHMAD SAFUAN

PEMBANGUNAN DIKEBUT: Pekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan Kali Kuto di ruas Tol Batang-Semarang di Jawa Tengah, kemarin. Pembangunan Tol Trans-Jawa Ruas Semarang-Batang sepanjang 75 km terus dikebut, yakni diharapkan tol ini selesai akhir 2018 untuk dapat mempercepat arus barang dan orang hingga menghidupkan ekonomi warga.

tempuh ruas pantura yang semula 2 jam, kini kurang dari 1 jam.

"Kalau saya, yang paling terasa saat mudik lalu. Perjalanan melalui Tol

Trans-Jawa dari Jakarta-Semarang meskipun sebagian masih bersifat fungsional hanya 6-7 jam. Mudik tahun-tahun sebelumnya harus

ditempuh 12 jam," ujar Cahyo, 55, warga Kota Semarang yang punya usaha di Bekasi, Jawa Barat.

Tol Batang-Semarang sepanjang 75 km hingga kini masih dalam tahap penyelesaian dan dijadwalkan akhir 2018 sudah selesai. Dengan demikian, pada akhir 2019 seluruh Tol Trans-Jawa mulai ujung barat hingga timur Pulau Jawa Merak - Banyuwangi sepanjang 1.150 km telah tersambung tol.

Saat ini pembangunan Tol Batang - Semarang masih terus dikebut. Menurut Rois, 48, sopir bus AKAP di Terminal Mangkang Semarang, perjalanan dari Semarang ke Jakarta atau sebaliknya yang cukup berat mulai Semarang-Pemalang. "Namun, jika tol telah selesai semua, nantinya terasa ringan. Selain kondisi jalan yang mulus, juga waktu tempuh lebih pendek," ujarnya.

Distributor makanan Tika, 46, juga mengakui perjalanan ke selatan kini lancar hingga Salatiga melalui tol. Ketersendatan sering kali muncul di beberapa wilayah, seperti Boyolali.

"Kalau tol sampai Kartasura sudah tersambung, paling lama hanya butuh waktu 2 jam perjalanan. Namun, kalau sekarang, 3-4 jam Semarang-Solo," imbuhnya. (AS/X-7)

Judul	Pemerintah Jawa Barat Ubah Rencana Tata Ruang	Tanggal	Kamis, 6 September 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 21)		
Resume	Asisten ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution, mengatalan tengah menuntaskan revisi rencana tata ruang wilayah Jawa Barat untuk mengadopsi proyek jalan tol dalam kota Bandung.		



Gerbang tol Soreang di jalan tol Soreang-Pasir Koba (Soroja) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 4 Desember 2017.

JALAN TOL DALAM KOTA BANDUNG

Pemerintah Jawa Barat Ubah Rencana Tata Ruang

Proyek jalan tol NS Link Bandung mulai dicanangkan.

Fery Firmansyah
fery@tempo.co.id

BANDUNG — Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution, mengatakan tengah menuntaskan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Barat untuk mengadopsi proyek jalan tol dalam kota Bandung, salah satunya ruas jalan tol North-South (NS) Link yang dicanangkan pada Selasa lalu. “Kami sedang menuntaskannya,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Menurut Eddy, NS Link merupakan perpanjangan dari jalan tol Soreang-Pasir Koba (Soroja) yang sudah beroperasi sejak Desember lalu. Jalan tol Soroja dikelola oleh PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ), perusahaan yang didirikan oleh PT Citra Mar-

ga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT Jasa Sarana milik pemerintah Jawa Barat, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Nantinya RTRW Provinsi Jawa Barat akan mencantumkan proyek jalan tol dalam kota Bandung dan NS Link. Eddy mengatakan nota kesepahaman yang diteken oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan CMLJ dan Jasa Sarana menyebutkan NS Link sebagai perluasan layanan jalan tol Soroja yang membelah ke tengah Kota Bandung. Pemerintah Jawa Barat juga memberikan izin penggunaan median jalan provinsi untuk proyek tersebut. “Nota kesepahaman ini juga menyepakati kerja sama investasi. Soroja kan dia (CMLJ) yang mengelola, tinggal diperluas,” ujar Eddy.

Ditemui di Gedung Sate, Bandung, Selasa lalu, penjabat Gubernur Jawa

Barat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan menyatakan jalan tol NS Link akan menjadi ikon Kota Bandung. “Sampai sekarang belum ada jalan tol dalam kota di Jawa, kecuali di Jakarta. Jakarta pun hanya dari Tanjung Priok ke Cawang, sisanya jalan tol antar-kota,” kata dia.

Menurut Iriawan, proyek jalan tol tersebut akan dilanjutkan oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat terpilih yang dilantik Presiden Joko Widodo, kemarin. “Saya sudah bicarakan secara khusus dengan Pak Ridwan Kamil,” ujar dia. Iriawan juga mengaku sudah melobi pemerintah pusat agar jalan tol tersebut mendapat lampu hijau. “Tentunya akan ada pengkajian. Saya ingin ini supaya betul-betul terlaksana, karena untuk mengurangi kemacetan di Bandung.”

Pendiri CMNP, Jusuf Hamka, mengatakan CMLJ yang merepresentasikan swasta, badan usaha milik daerah, dan badan usaha

milik negara sudah siap menggarap proyek jalan tol NS Link. Ihwal prospek bisnisnya, dia membandingkan lalu lintas di jalan tol Soroja yang melonjak dari target awal 16 ribu kendaraan sehari menjadi 35 ribu kendaraan per hari. “Jalan tol dalam kota Bandung, saya pikir, *minimum traffic*-nya bisa 50 ribu atau 100 ribu kendaraan per hari,” kata dia.

Jusuf mengatakan biaya konstruksi yang mencapai Rp 8,5 triliun akan ditanggung tiga pihak pemilik CMLJ sesuai dengan proporsi saham masing-masing. “Insya Allah tidak akan keluar uang pemerintah, semuanya dari swasta,” kata dia.

Adapun Direktur Utama PT Jasa Sarana Dyah, S.H. Wahjusari, mengatakan jalan tol NS-Link sepanjang 14,30 kilometer akan berdiri di atas lahan seluas 75 ribu meter persegi. Pembangunan jalan tol tersebut direncanakan dibagi dalam tiga seksi dan akan dimulai pada triwulan IV 2019.

● AHMAD FERY (BANDUNG)

Terhubung dengan Jaringan Jalan Tol Besar

PROYEK jalan tol NS Link bakal tersambung dengan jaringan jalan tol besar, seperti Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan tol lain yang menghubungkan seluruh kawasan Jawa Barat. Tercatat ada 19 proyek jalan tol yang harus selesai pada 2016-2023.

PROFIL JALAN TOL NORTH-SOUTH LINK BANDUNG

- Pemrakarsa: PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan pemerintah Jawa Barat.
- Rencana kontraktor dan pemegang konsesi: PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) dan PT Jasa Sarana.
- Ground breaking: triwulan IV 2019.
- Perkiraan investasi: Rp 8,5 triliun.
- Panjang jalan: 14,30 kilometer.
- Luas lahan: 75 ribu meter persegi.

Fase:

- Seksi I Pasirkoja-Mohamad Toha (7,6 kilometer)
- Seksi II Mohamad Toha-Gatot Subroto (3,60 kilometer)
- Seksi III Gatot Subroto-Surapati (3,1 kilometer).

RANGKAIAN PROYEK JALAN TOL DI JAWA BARAT

PROYEK	PANJANG JALAN (KM)	WAKTU Pengerjaan
Soreang-Pasir Koba	10,57	2010-2018
Bandung Intra Urban Toll	27,3	2014-2020
Cikopo-Palimanan	116	2010-2016
Cileunyi-Sumedang-Dawuan	60,1	2010-2017
Ciawi-Sukabumi	54	2009-2020
Sukabumi-Ciranjang	28	2016-2021
Ciranjang-Padalarang	33	2018-2023
Cimanggis-Cibitung	25,9	2009-2019
Cikarang-Tanjung Priok	34,5	2009-2018
Cileunyi-Nagreg-Tasik	55	2015-2019
Tasik-Ciamis-Banjar	52	2017-2022
Banjar-Pangandaran	40	2017-2023
Depok-Antasari	21,54	2009-2019
Bogor Ring Road	11	2009-2019
Cinere-Serpong	10,14	2009-2019
Cinere-Jagorawi	14,64	2008-2018

ANAKAH FERY FIRMANSYAH, AHMAD FERY (BANDUNG)
SUMBER: PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, WAWAWCAH